

EFEKTIVITAS KOMUNIKASI PEMBANGUNAN PADA MASYARAKAT SEKITAR HUTAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK

Sri Desti Purwatiningsih*, dan Amiruddin Saleh**

*) Program Studi Komunikasi, FIKOM UPI YAI Jakarta
Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat
Telp. 021 3928075

***) Program Pascasarjana Komunikasi Pembangunan IPB Bogor
Jl. Raya Darmaga, Gedung Andi Hakim Nasoetion
Kampus IPB Darmaga Bogor 16680 - Jawa Barat, Indonesia
Telp. 0251 628448

Abstract

To socialise the utilization programs and forest conservation to the people who live around the forest takes the proper and effective communication directly through the communicator, the message (information), the communicant, the communication channels and its effect. The effective communication is expected to increase or give some impact on the understanding of forest communities in improving physical productivity, optimizing the arable land, improving the quality of the forest environment, and maximizing revenues.

Key Words: *Effectiveness of communication, information, utilization and conservation of forest.*

PENDAHULUAN

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan). Hutan juga sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat sehingga mempunyai peranan yang sangat besar bagi kelangsungan hidup makhluk hidup yang berada di sekitarnya terutama manusia. Salah satu peranan hutan adalah bahwa pepohonan menyerap karbon dioksida (CO₂) dari udara dan memproduksi serta mengeluarkan banyak oksigen (O₂) terutama pada waktu siang hari yang mana oksigen (O₂) ini sangat diperlukan makhluk lain dalam melakukan pernafasan.

Pada saat ini keberadaan hutan sedang mengalami berbagai tekanan, terjadi deforestasi atau kerusakan hutan yang terjadi hampir di seluruh kawasan hutan di Indonesia. Penurunan kuantitas dan kualitas hutan di Indonesia serta telah banyak

dikemukakan oleh berbagai peneliti dari banyak lembaga penelitian, kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media massa, maupun aparat pelaksana dari kalangan pemerintah. Pada tahun 1986, Bank Dunia telah memberikan peringatan atas kondisi hutan di Indonesia bahwa "dalam 40 tahun Indonesia akan menjadi tandus dan faktor penyebab utamanya adalah praktek penebangan kayu tanpa perhatian" (Fuad & Maskanah, 2000). MoF/FAO pada tahun 1991 menyebutkan, bahwa rata-rata laju deforestasi di Indonesia dalam rentang tahun 1982 sampai dengan 1990 adalah 1,3 juta ha per tahun.

Fuad dan Maskanah (2000) menyebutkan bahwa pada tahun 1930-an tercatat bahwa luas hutan di Indonesia adalah + 144 juta ha dan berkurang menjadi + 119,3 juta ha pada tahun 1980-an. Hal ini berarti dalam rentang waktu selama 50 tahun terjadi pengurangan luas hutan sebesar 17,15% (24,7 juta ha) atau setara dengan 490.000 ha per tahun, bahkan pada saat ini, deforestasi hutan di Indonesia telah mencapai 1,8 juta hektar per tahun, dengan kata lain Indonesia kehilangan hutan seluas enam kali luas lapangan sepak bola setiap harinya.

Menurut Djaenudin (1994) Kawasan hutan perlu dipertahankan berdasarkan pertimbangan fisik, iklim dan pengaturan tata air serta kebutuhan sosial

1 Kontak Person : **Sri Desti Purwatiningsih**
Prodi Komunikasi FIKOM UPI YAI Jakarta
Telp. 021 3928075

ekonomi masyarakat dan negara. Hutan yang dipertahankan terdiri dari hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, hutan konservasi, hutan produksi terbatas dan hutan produksi. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada hutan konservasi sebagai hutan taman nasional yang perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tetap untuk kepentingan hidrologi, yaitu mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi, memelihara keawetan dan kesuburan tanah baik dalam kawasan hutan bersangkutan maupun kawasan yang dipengaruhi di sekitarnya.

Didasari pada kenyataan di atas, maka perlu adanya pemeliharaan dan perlindungan terhadap hutan yang dilakukan secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan cara pengawetan atau dengan istilah lain melakukan konservasi terhadap hutan yang mengalami kerusakan atau kepunahan. Hutan Konservasi merupakan kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa dan ekosistemnya serta berfungsi sebagai wilayah penyangga kehidupan. Kawasan hutan suaka alam terdiri atas cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru (Pusbinlulut, 2002).

Apabila hutan tidak dipertahankan atau tidak dilestarikan maka fungsi perlindungan hutan terhadap tanah akan hilang sehingga akan terjadi erosi bahkan longsor seperti yang banyak terjadi sekarang ini bila musim hujan datang. Erosi akan semakin besar dengan besarnya intensitas hujan serta makin curam dan panjangnya lereng. Akibat adanya erosi kesuburan tanah akan berkurang karena lapisan atas sudah terkikis dan terbawa oleh air sehingga akan menurunkan produksi tanaman dan pendapatan petani (Sinukaban, 1994).

Dengan terlibatnya masyarakat dalam pengelolaan hutan maka diharapkan akan kembali muncul rasa tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap hutan dari semua pihak, sebagaimana dinyatakan oleh Barber dan Johnson (1999) bahwa diperlukan pengakuan terhadap pengelolaan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan dan dalam hutan sebagai pihak yang secara langsung berhubungan dengan hutan sehingga masyarakat lokal tersebut dapat menjaga kelestarian lingkungan dan tetap memberikan kebutuhan ekonomi bagi kehidupan mereka.

PEMBAHASAN

Pemerintah mendefinisikan Taman Nasional sebagai suatu kawasan pelestarian alam yang memiliki

ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan budidaya, rekreasi dan pariwisata. Pada saat ini masyarakat Indonesia secara luas semakin memahami pentingnya kehadiran Taman Nasional tersebut, meskipun terkadang pemahaman itu masih relatif rendah dan cukup beragam. Disadari maupun tidak, keberadaan suatu taman nasional sangatlah penting untuk menjaga fungsi hutan yang berkesinambungan sebagai pendukung sistem penyangga kehidupan (TNGHS, 2008).

Salah satu taman nasional yang perlu mendapat perhatian serius adalah Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) yang berada di wilayah Kabupaten Bogor dan Sukabumi, Provinsi Jawa Barat karena semakin luasnya kawasan hutan TNGHS yang mengalami kerusakan. Menurut Sudarmadji (2000), dalam penelitian Widada (2004) "kerusakan TNGHS disebabkan oleh aktivitas masyarakat di antaranya melakukan kegiatan eksplorasi penambangan emas tanpa izin, penebangan pohon dan pengambilan kayu bakar, dan perburuan satwa serta perambahan kawasan." Dalam hal ini jika penambangan emas tanpa izin ini berjalan terus tentu bisa merusak pelestarian lingkungan. Jika kawasan hutan konservasi TNGHS tidak dilakukan penghijauan atau reboisasi, akan menjadi bencana alam. Selain itu, akan menimbulkan kerugian besar karena habitat flora dan fauna yang dilindungi menghilang.

Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang dikelola oleh Balai Taman Nasional Gunung Halimun-Salak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor.175/Kpts-II/2003, yaitu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan, dengan total luasan 113.357 hektar. Awalnya, Taman Nasional ini ditetapkan sebagai salah satu Taman Nasional di Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 282/Kpts-II/1992 tanggal 28 Pebruari 1992 dengan luas 40.000 hektar dan resmi ditetapkan pada tanggal 23 Maret 1997 sebagai salah satu unit pelaksana teknis Departemen Kehutanan.

Dalam pengelolaannya, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dibagi dalam beberapa zona pengelolaan, yaitu: (1) Zona Inti (15.830 ha); Zona Inti merupakan zona yang paling sensitif baik secara fisik maupun biologis, sehingga memerlukan perlindungan ekstra dan seminimal mungkin campur tangan manusia. (2) Zona Rimba (24.189 ha); Zona Rimba merupakan zona yang masih sensitif baik secara fisik dan biologis. (3) Zona Pemanfaatan (79 ha); Zona Pemanfaatan disediakan untuk pengembangan pengelolaan dan sarana wisata alam, dan (4) Zona Rehabilitasi (260 ha); Zona Rehabilitasi merupakan suatu zona atau daerah yang rusak karena

adanya kegiatan ilegal dan sekarang memerlukan usaha rehabilitasi dengan penanaman kembali jenis-jenis asli untuk mengembalikan fungsinya (Dephut, 2006).

Gambaran penurunan kualitas hutan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak dapat diteliti dari berbagai sudut pandang, salah satunya adalah dari sisi partisipasi masyarakat sekitar hutan dalam mengelola, memanfaatkan dan melestarikan hutan konservasi tersebut. Sebenarnya sudah banyak upaya yang dilakukan oleh Balai TNGHS dalam melakukan kegiatan komunikasi dalam rangka penyelamatan dan pelestarian konservasi hutan TNGHS, dan salah satu upayanya adalah dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat sekitar hutan TNGHS, tetapi upaya ini belum memperlihatkan dampak yang cukup memuaskan, karena masih banyak masyarakat sekitar hutan yang memanfaatkan hutan tetapi tidak melestarikannya kembali sehingga banyak kawasan hutan konservasi TNGHS yang mengalami kerusakan. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian dari (Setyono, 2003) bahwa beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan kawasan hutan konservasi TNGHS menurut Balai TNGHS antara lain; (1) Kondisi tata batas di lapangan yang tidak jelas sehingga terjadi tumpang tindih dengan masyarakat dan Dinas Kehutanan; (2) Sumberdaya manusia atau petugas kehutanan yang terbatas, baik dari segi kuantitas dan kualitas maupun distribusinya di lapangan; (3) Apresiasi dan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan Taman Nasional masih rendah; (4) Tingkat ketergantungan masyarakat dengan sumberdaya hutan masih tinggi, mengakibatkan adanya pencurian hasil hutan (kayu dan non kayu); dan (5) Masih adanya perburuan satwa dan perambahan hutan secara tradisional.

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan dan pelestarian kawasan hutan konservasi TNGHS tersebut, perlu adanya upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan konservasi TNGHS yang dirasakan masih kurang. Untuk itu maka: (1) Perlu dilakukan penyebarluasan informasi secara efektif tentang manfaat keberadaan taman nasional kepada masyarakat sekitar hutan, (2) Perlu dibangunnya saluran komunikasi, informasi dan promosi tentang tata-cara pengelolaan taman nasional TNGHS melalui berbagai media, baik secara interpersonal, kelompok, maupun melalui media massa, dan (3) Memberi kesempatan kepada masyarakat sekitar hutan untuk memanfaatkan kawasan hutan konservasi dengan berpartisipasi aktif dalam pengelolaan hutan.

Pemahaman masyarakat terhadap konservasi alam memang belum memuaskan secara keseluruhan

sementara partisipasi masyarakat yang positif terhadap pemanfaatan dan pelestarian kawasan hutan konservasi TNGHS mutlak adanya. Oleh karenanya, penyuluhan untuk merubah perilaku dan publikasi untuk menyadarkan masyarakat masih harus digalakkan dengan program-program yang diintegrasikan dengan strategi yang lainnya (Dephut, 2006).

EFEKTIVITAS KOMUNIKASI

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Komaruddin (1983) mengemukakan bahwa efektif adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Sejalan dengan pengertian tersebut, Sugandha (1988) menyatakan bahwa prinsip efektif itu adalah kemampuan mencapai sasaran dan tujuan akhir melalui kerjasama orang-orang dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada seefisien mungkin.

Menurut Berlo (1960), komunikasi akan berjalan efektif apabila ketepatannya dapat ditingkatkan dan gangguannya (*noise*) dapat diperkecil. Oleh karena itu meningkatkan ketepatan dan mengurangi gangguan pada setiap unsur komunikasi dalam kegiatan penyebaran informasi mengenai tata cara pengelolaan dan pelestarian hutan. Hal tersebut dapat terjadi bila: (1) Petugas kehutanan memiliki keterampilan berkomunikasi, bersikap positif terhadap masyarakat sekitar hutan, serta mampu menyesuaikan diri dengan sistem sosial budaya setempat, (2) Masyarakat sekitar hutan memiliki kemampuan berkomunikasi, bersikap positif terhadap petugas kehutanan dan pesan yang disampaikan, memahami isi pesan yang disampaikan serta perilaku kebiasaan dalam menerima dan menafsirkan pesan, (3) Pesan yang disampaikan oleh petugaskehutanan harus memenuhi persyaratan kode atau bahasa pesan, kesesuaian isi pesan dengan tujuan komunikasi serta pemilihan dan pengetahuan bahasa dan isi pesan, dan (4) Media komunikasi yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, sesuai dengan isi pesan, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat serta efisien dalam memilih media. Prinsip penggunaan media harus dapat dilihat, didengar, disentuh, dicium dan dirasakan.

Menurut Schramm dan Forter (1973), efektivitas komunikasi ditujukan oleh kondisi saling melengkapi antara komunikan secara umum dengan penggunaan media komunikasi dalam mengantarkan suatu perubahan. Efektivitas komunikasi atau kondisi sukses komunikasi ditentukan oleh: (1) Komunikator yang mampu mengenal komunikan, memahami

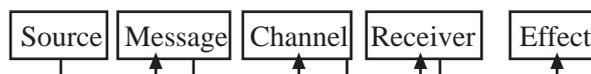
kerangka rujukan dan bidang pengalamannya, dan (2) Ketepatan pesan yang disampaikan, yaitu pesan harus dirancang agar menarik perhatian sasaran dengan menggunakan tanda-tanda yang tertuju pada pengalaman yang sama antara komunikator dengan komunikan. Pemilihan media tergantung pada tujuan yang akan disampaikan dan teknik yang akan digunakan (Effendy, 2003).

Pemahaman informasi atau pesan dalam pengelolaan hutan konservasi TNGHS dalam proses komunikasi merupakan salah satu efek komunikasi. Dalam komunikasi massa, komunikasi kelompok, juga komunikasi interpersonal terdapat tiga dampak atau efek komunikasi (Nur, 2004). Hal ini diperkuat dengan pendapat dari Effendy (2007) yang menyatakan bahwa efektivitas komunikasi adalah adanya kesamaan makna terhadap pesan komunikasi dan dapat dikatakan efektif jika dapat menimbulkan dampak; (1) Kognitif, yakni meningkatnya pengetahuan masyarakat sekitar hutan. Yang diharapkan dari dampak yang ditimbulkan oleh adanya penerimaan pesan yang disampaikan oleh petugas kehutanan TNGHS adalah bertambahnya informasi dan pengetahuan serta meningkatnya pemahaman bagi masyarakat sekitar hutan TNGHS mengenai pemanfaatan dan pelestarian hutan TNGHS, (2) Afektif, yakni adanya perubahan sikap atau pandangan masyarakat sekitar hutan TNGHS karena hatinya tergerak akibat dari pesan yang diterimanya. Pada tahap ini petugas kehutanan diharapkan setelah menyampaikan informasi dan pesan-pesan mengenai tata cara pengelolaan hutan TNGHS dapat merubah sikap atau perilaku masyarakat sekitar hutan dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan konservasi TNGHS, dan (3) Behavioral, yaitu perubahan perilaku atau tindakan yang terjadi pada masyarakat sekitar hutan konservasi TNGHS. Dalam hal ini masyarakat sekitar hutan TNGHS sudah pada tahap melakukan tindakan dengan berperan aktif dan berpartisipasi penuh dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan TNGHS.

Pelaksanaan untuk tercapainya sebuah komunikasi yang efektif dalam penyampaian informasi dari petugas kehutanan kepada masyarakat sekitar hutan masih banyak ditemukan kendala atau hambatan, sesuai dengan pendapat dari Effendy (2007) yang diperkuat oleh pendapat dari Levis (1996) bahwa dalam pelaksanaan komunikasi ke tengah masyarakat desa, masih terdapat hambatan yang dihadapi, yaitu: (1) Selalu terjadi kesenjangan antara petugas lapangan dengan kondisi sosial ekonomi serta budaya masyarakat setempat, (2) Seringkali petugas belum mampu meyakinkan para peternak tentang tugas dan peranan mereka dalam memberikan informasi yang terkait dengan usahatani peternak, (3) Para petugas

kurang memahami strategi komunikasi yang efektif dan efisien yang dapat memperbesar pencapaian keberhasilan komunikasi, (4) Setiap masyarakat memiliki karakteristik tersendiri dalam melaksanakan sistem komunikasi, dan (5) Variasi bahasa daerah juga merupakan salah satu hambatan tidak efektifnya pelaksanaan komunikasi di pedesaan.

Model komunikasi SMCRE yang diperkenalkan oleh Everett. M. Rogers dan Floyd Shoemaker "Model umum dari proses komunikasi adalah sumber (komunikator), pesan, saluran komunikasi, penerima (komunikan), dan efek (Ruslan, 2003)."



Gambar 1. Model Komunikasi SMCRE Rogers dan Shoemaker
Sumber: Ruslan, 2003

Kapasitas Petugas Kehutanan (Komunikator)

Petugas kehutanan sebagai komunikator adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan dalam sebuah proses komunikasi. Dengan kata lain, komunikator merupakan seseorang atau sekelompok orang yang berinisiatif untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan. Seorang komunikator tidak hanya berperan dalam menyampaikan pesan kepada penerima, namun juga memberikan respons dan tanggapan, serta menjawab pertanyaan dan masukan yang disampaikan oleh penerima, dan publik yang terkena dampak dari proses komunikasi yang berlangsung, baik secara langsung maupun tidak langsung (Wiryanto, 2005). Komunikator dalam penelitian di sini adalah petugas kehutanan yang menyampaikan pesan-pesan atau informasi mengenai konservasi hutan TNGHS kepada masyarakat sekitar hutan.

Agar tercapainya komunikasi yang efektif antara petugas kehutanan dengan masyarakat sekitar hutan maka perlu adanya kemampuan komunikasi yang harus dimiliki oleh petugas kehutanan TNGHS. Menurut Kridalaksana (2000) kemampuan komunikasi adalah kemampuan komunikator (orang yang menyampaikan informasi) untuk mempergunakan bahasa yang dapat diterima dan memadai secara umum. Batasan lain menurut Berelson & Steiner (dalam Mulyana, 2001) mengartikan kemampuan komunikasi sebagai kemampuan mentransmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan dengan menggunakan simbol-simbol seperti perkataan, gambar, figur, grafik dan sebagainya.

Menurut Book (*dalam* Cangara, 2002) kemampuan komunikasi adalah proses simbolik yang menghendaki individu agar dapat mengatur lingkungan dalam hubungan sosialnya melalui pertukaran informasi untuk mengubah sikap dan tingkah laku orang lain.

Adapun kemampuan aparat/petugas kehutanan sebagai sumber informasi merupakan kemampuan komunikator untuk melaksanakan komunikasi secara efektif adalah sebagai berikut: (1) Kepercayaan kepada Komunikator (*source credibility*). Kepercayaan kepada Komunikator ditentukan oleh keahliannya dan dapat tidaknya ia dipercaya. Kepercayaan masyarakat dapat tercipta manakala si komunikator dinilai punya pengetahuan, keahlian, atau pengalaman yang relevan dengan topik pesan yang disampaikan itu bersifat obyektif, (2) Daya Tarik Komunikator (*source attractiveness*). Seorang komunikator mempunyai kemampuan untuk melakukan perubahan sikap melalui mekanisme daya tarik, jika komunikator merasa bahwa komunikator ikut serta dengan mereka dalam hubungannya dengan opini secara memuaskan, dan (3) Kekuatan/Kekuasaan sumber (*source power*). Kekuatan atau kekuasaan sumber terhadap pihak penerima, secara umum dapat terjadi melalui empat cara, yaitu: kharisma, yaitu faktor bawaan yang melekat pada diri seseorang, wibawa otoritas, yaitu yang berkaitan dengan kedudukan atau otoritas formal, kompetensi/keahlian, yaitu sesuatu yang dapat diperoleh seseorang melalui proses belajar, dan *compliance*/pemenuhan, yaitu sumber dinilai punya kekuatan atau kekuasaan apabila ia mampu memberikan imbalan dan hukuman kepada penerimanya.

Informasi Pengelolaan Hutan Konservasi TNGHS

Isi pesan adalah sebagai materi atau bahan dalam pesan yang telah dipilih oleh sumber untuk mengatakan maksudnya. Isi pesan yang disampaikan meliputi informasi, kesimpulan yang ditarik dari pertimbangan yang diusulkan (Effendy 2007). Informasi adalah sebagai setiap hal yang membantu seseorang menyusun atau menukar pandangannya tentang alam kehidupan. Dengan kata lain, informasi dapat mengurangi keragu-raguan dalam situasi tertentu. Jadi informasi merupakan keterangan-keterangan tentang sesuatu yang berfungsi mengurangi ketidakpastian bagi seseorang Kincaid & Schramm *dalam* Moeryanto, 1996).

Informasi yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah informasi mengenai konservasi hutan TNGHS. Menurut Verderber (1989), informasi yang disampaikan memiliki nilai (*informatif value*), yaitu; pertama kebaruan informasi. Artinya informasi yang baru cepat diterima dan menarik untuk diketahui,

karena sifat baru atau kebaruan adalah sesuatu yang tidak diduga yang menarik perhatian banyak orang. Kebaruan tentang suatu informasi akan berbeda pada setiap orang. Nilai informasi yang kedua, Relevansi informasi, relevansi adalah nilai pribadi seseorang yang perlu diketahui dalam melihat informasi. Berkaitan dengan bagaimana banyaknya informasi yang berhubungan dengan minat dan kebutuhan sasaran.

Informasi harus mempunyai nilai penting dan berguna bagi masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan. Kaitannya dengan kebutuhan masyarakat, masyarakat akan tertarik dengan informasi yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya dan mereka akan mencari lebih jauh mengenai informasi tentang pengelolaan hutan. Selanjutnya nilai informasi yang ketiga adalah kreativitas. Penyajian informasi akan bernilai tinggi bila ditulis berbeda dengan informasi yang ditulis oleh pihak lain. Data dan fakta yang akurat, kata-kata disusun dengan baik, dikembangkan secara kreatif, nalar, logis, dan sesuai dengan kenyataan yang ada akan dapat lebih menarik perhatian.

Saluran Komunikasi

Saluran komunikasi adalah jalan yang dilalui pesan dari komunikator untuk sampai ke komunikannya. Terdapat dua jalan agar pesan dari komunikator sampai ke komunikannya, yaitu tanpa media (*nonmediated communication* yang berlangsung *face-to-face*) atau dengan media. Media yang dimaksud di sini adalah media komunikasi seperti telepon, fax, email, surat kabar, radio, televisi dan sebagainya. Media merupakan bentuk jamak dari medium. Medium komunikasi diartikan sebagai alat perantara yang sengaja dipilih komunikator untuk menghantarkan pesannya agar sampai ke komunikan.

Rogers (2003) menguraikan tentang kategorisasi saluran komunikasi, bahwa seringkali sulit bagi penerima pesan untuk membedakan sumber pesan dan saluran yang membawa pesan. Sumber adalah individu atau institusi yang menghasilkan pesan, sedangkan saluran adalah pesan yang didapatkan dari sumber untuk disampaikan kepada penerima. Menurut Rogers (2003) ada dua macam saluran komunikasi yang dapat menyampaikan pesan-pesan pembangunan pertanian atau informasi pertanian, yaitu saluran media massa dan saluran interpersonal. Santucci (2005) *dalam* Matindas (2011) menambahkan selain saluran media massa dan interpersonal juga dikenal saluran komunikasi melalui kelompok atau metode kelompok.

Karakteristik Individu Masyarakat Sekitar Hutan Konservasi TNGHS

Karakteristik komunikasi, dalam hal ini masyarakat sekitar hutan konservasi TNGHS, sangat beragam dan sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan yang dimilikinya. Bagaimana mereka membuka sandi pesan sebagian adalah ditentukan oleh sikapnya terhadap dirinya sendiri, terhadap sumbernya dan terhadap isi pesan yang disampaikan oleh petugas kehutanan. Semua hal tentang sikap sumber berlaku juga untuk penerima atau komunikasi (Berlo, 1960). Aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat sekitar hutan dapat diatasi dengan pendekatan komunikasi yang tepat, sedangkan yang lainnya masih diperlukan dukungan semua pihak yang relevan.

Lionberger dan Gwin (1982) menyebutkan bahwa faktor-faktor atau perubahan-perubahan penting dalam mengkaji masyarakat adalah perubahan personal seperti umur, pendidikan, dan karakter psikologis. Perubahan-perubahan tersebut merupakan karakteristik yang melekat pada diri individu masyarakat. Perubahan demografi seperti jenis kelamin, umur dan status sosial merupakan indikator yang digunakan untuk menerangkan perilaku komunikasi.

Perilaku komunikasi di sini dimaksudkan adalah aktivitas individu masyarakat dalam mencari informasi dan memilih saluran komunikasi yang tersedia dalam kaitannya dengan desiminasi informasi pertanian. Apabila dihubungkan dengan karakteristik individu, Rogers (2003) mengatakan bahwa orang-orang yang dikenal inovatif dan kosmopolit lebih banyak menggunakan saluran komunikasi media massa, sedangkan mereka yang kurang inovatif banyak menggunakan saluran komunikasi interpersonal. Di masyarakat pedesaan, pada dasarnya pengaruh media massa tidaklah begitu kuat. Seperti dikatakan De Fleur dan Rokeach (1975), di samping media massa masih ada pengaruh lain pada khalayak yang sifatnya interpersonal.

Kekosmopolitan Masyarakat sekitar Hutan TNGHS

Arti harfiah kekosmopolitan adalah tingkat kemampuan seseorang dalam mencari informasi pengetahuan berupa pengalaman melihat, mendengar, membaca (media massa, cetak maupun elektronik) "bergaul" maupun bepergian ke suatu tempat sehingga dapat menambah pengalaman dalam memecahkan masalah dan perubahan perilaku pribadinya. Perilaku individu untuk melakukan aktivitas komunikasi timbul berdasarkan dorongan yang ada dalam diri individu tersebut untuk melakukan sesuatu gerakan atau tindakan yang sesuai dengan keinginannya. Menurut Pambudi (1999) bahwa prinsip dasar individu adalah (1) individu memiliki perbedaan perilaku, (2) individu mempunyai kebutuhan yang berbeda, (3) individu

berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak, (4) individu memahami lingkungannya, (5) individu memahami reaksi terhadap aksi dan (6) banyak faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku.

Rogers (2003) menyebutkan ada tiga peubah yang dapat digunakan untuk mengetahui perilaku komunikasi, yaitu pencarian informasi, kontak dengan penyuluh dan keterdedahan pada media massa.

Kekosmopolitan dapat berupa keterbukaan anggota-anggota masyarakat sekitar hutan pada informasi melalui hubungan mereka dengan berbagai sumber informasi yang dibutuhkan. Mosher (1987) dan Mubyarto (1984) mengemukakan bahwa keterbukaan seseorang berhubungan dengan penerimaan perubahan-perubahan seseorang untuk meningkatkan perbaikan usahatani mereka. Rogers (2003) mengemukakan bahwa kekosmopolitan individu dicirikan dengan sejumlah atribut yang membedakan mereka dari orang lain di dalam komunitasnya, yaitu: 1) individu tersebut memiliki status sosial, 2) partisipasi sosial lebih tinggi, 3) lebih banyak berhubungan dengan pihak luar, 4) lebih banyak menggunakan media massa, 5) memiliki lebih banyak hubungan dengan orang lain maupun lembaga yang berada di luar komunitasnya.

Kontak dengan Pihak Luar Komunitas

Menurut Rogers (2003), salah satu ciri petani kosmopolit adalah memiliki intensitas hubungan atau kontak yang lebih tinggi dengan pihak luar komunitas. Hal ini diartikan bahwa masyarakat yang kosmopolit memiliki hubungan dengan masyarakat maju lain atau pihak-pihak lain yang berada di luar komunitasnya. Soekanto (2006) menyatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial adalah adanya kontak dengan budaya lain. Apabila pendapat Soekanto tersebut diterjemahkan pada konteks individu, dapat dimaknai bahwa perubahan perilaku seseorang diakibatkan oleh adanya kontak dengan pihak luar komunitas, sebagaimana kemudian ditegaskan oleh Soekanto (2006) bahwa pertemuan individu dari satu masyarakat dengan individu dari masyarakat lainnya memungkinkan terjadinya difusi.

Aksesibilitas Informasi/Inovasi Pengelolaan Hutan

Informasi adalah kegiatan pengumpulan atau pengolahan data sehingga dapat menghasilkan pengetahuan dan keterangan baru (Liliweri, 2001). Menurut Kincaid dan Schramm (1977) informasi adalah segala hal yang membantu dalam menyusun atau menukar pandangan tentang alam kehidupan yang dinyatakan dengan pengertian, gagasan, pemikiran, atau pengetahuan.

Masyarakat yang kosmopolit memiliki akses

luas terhadap berbagai sumber informasi sehingga mereka memiliki informasi yang lebih banyak, sebagai akibatnya pengetahuan dan wawasan mereka lebih luas dibandingkan dengan kebanyakan masyarakat lainnya. Informasi yang diperoleh bisa dalam bentuk inovasi atau teknologi pengelolaan hutan yang bermanfaat dan menguntungkan bagi kepentingan usaha mereka. Banyaknya informasi yang dimiliki akan berdampak pada perilaku mereka.

Keterdedahan terhadap Media Massa

Media massa merupakan saluran komunikasi yang bersifat umum atau massal meliputi pers (surat kabar), radio, film, dan televisi dengan fungsi sosial yang kompleks (Arifin, 1994). Menurut teori komunikasi jarum hipodermik pesan-pesan yang disampaikan melalui media massa memiliki kekuatan atau pengaruh terhadap perilaku komunikan (Rakmat, 2001). Menurut Rogers (2003), komunikan yang kosmopolit akan lebih banyak menggunakan atau terdedah oleh media massa dibandingkan dengan kebanyakan komunikan lainnya, dengan demikian mereka memiliki informasi yang lebih banyak.

Jahi (1988) mengemukakan keterdedahan terhadap media massa akan memberikan kontribusi terhadap perbedaan perilaku. Media massa memiliki peranan memberikan informasi untuk memperluas cakrawala, memusatkan perhatian, menimbulkan aspirasi, dan sebagainya. Dalam penelitian Pambudi (1999) menegaskan semakin banyak media massa yang dipergunakan dan semakin banyak kontak interpersonal dalam mencari informasi maka akan semakin banyak pilihan cara-cara untuk meningkatkan kualitas usahatani peternak.

Pemanfaatan Hutan Konservasi TNGHS

Nilai ekonomi yang dihasilkan dari masing-masing tipe pemanfaatan sumberdaya alam (hasil hutan kayu, non kayu, tambang, perikanan, pertanian, pariwisata, dll) serta nilai ekonomi dari jasa lingkungan yang disediakan oleh kawasan hutan, hendaknya tidak dilihat sebagai nilai-nilai yang terpisah satu sama lain, karena setiap kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam (kegiatan ekonomi lain) tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dan saling memberikan dampak satu sama lain.

Salah satu aspek yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam program pembangunan adalah seberapa besar manfaat yang akan diperoleh masyarakat atas partisipasinya tersebut (Ife, 1995; Slamet, 2003). Demikian pula kaitannya dengan pemanfaatan hasil hutan yang berada di sekitar hutan TNGHS, apabila masyarakat sekitar hutan merasakan bahwa secara signifikan keterlibatan mereka dapat

memberikan jaminan atas kesejahteraan atau dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya, maka mereka akan semakin termotivasi untuk berpartisipasi.

Secara turun-temurun masyarakat sekitar hutan taman nasional gunung Halim Salak Kabupaten Lebak telah berinteraksi dengan hutan tersebut. Masyarakat sekitar hutan mengelola dan memanfaatkan hutan TNGHS dalam bentuk pemanfaatan ranting-ranting kering untuk keperluan kayu bakar rumah tangga, dan masyarakat biasanya menanam buah-buahan seperti pisang dan durian, membuat anakan pohon alami dan pohon-pohon yang pertumbuhannya cepat yang digunakan untuk konstruksi rumah serta tanaman berguna seperti bambu dan rotan juga ditanam untuk kebutuhan sehari-hari. juga menyadap air nira dari pohon kawung (aren). Pengambilan air nira ini tidak hanya untuk dikonsumsi saja tetapi juga untuk dijual ke pasar (TNGHS, 2008).

Penanaman pohon-pohon asli yang bermanfaat, energi alternatif, ekowisata dan program ekonomi berkelanjutan merupakan aktivitas konservasi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan konservasi TNGHS.

Pelestarian Hutan Konservasi TNGHS

Saat ini keberadaan hutan konservasi menjadi sangat penting dan strategis. Peranan yang dimainkan tidak hanya sebagai kegiatan dalam rangka rehabilitasi lahan, tetapi hutan konservasi saat ini telah merupakan salah satu andalan dalam perekonomian masyarakat dan berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Wijayanto (2006) menyatakan bahwa usaha hutan rakyat merupakan suatu penerapan model usahatani yang tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas fisik per satuan luas lahan, mengoptimalkan lahan garapan, memperbaiki kualitas lingkungan dan sumberdaya hutan, dan memaksimalkan pendapatan usaha.

Menurut Manan (1997) pengelolaan hutan sama dengan manajemen hutan yaitu penerapan metoda bisnis dan prinsip-prinsip teknis kehutanan dalam pengurusan suatu hutan. Tujuan pengelolaan hutan adalah tercapainya manfaat ganda (*multiple use*), yaitu menghasilkan kayu, mengatur tata air, tempat hidup margasatwa, sumber makanan ternak dan manusia, dan tempat rekreasi. Sebagai kegiatan manajemen, dengan demikian, kegiatan pengelolaan hutan, termasuk pengelolaan hutan rakyat, meliputi penyusunan rencana pengelolaan sumberdaya hutan, pemanfaatan sumberdaya hutan dan kawasan hutan, serta perlindungan sumberdaya hutan dan konservasi alam yang pada tataran pelaksanaannya mengedepankan terciptanya kelestarian hutan.

Melakukan pelestarian hutan sama dengan

menyelamatkan ekosistem dari hutan itu sendiri, ekosistem terbentuk oleh komponen hidup dan tak hidup di suatu tempat yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur. Keteraturan itu terjadi oleh adanya arus materi dan energi yang terkendalikan oleh arus informasi antara komponen dalam ekosistem itu. Masing-masing komponen mempunyai fungsi atau relung, selama masing-masing komponen itu melakukan fungsinya dan bekerjasama dengan baik, keteraturan ekosistem itupun terjaga. Keteraturan ekosistem menunjukkan ekosistem tersebut ada dalam suatu keseimbangan tertentu. Keseimbangan itu tidak bersifat statis melainkan dinamis. Ia selalu berubah-ubah, kadang-kadang perubahan itu besar dan kadang-kadang kecil. Perubahan itu dapat terjadi secara alamiah maupun sebagai perbuatan manusia. (Soemarwoto, 1983).

Artinya, membahas pengelolaan hutan tidak akan terlepas dari pembahasan atas kelestarian hutan. Asas kelestarian hutan menjadi landasan utama bagi kegiatan pengelolaan hutan. Dengan kata lain, pembahasan mengenai segala bentuk pengelolaan hutan akan selalu merupakan satu paket terpadu dengan pembahasan kelestarian hutan.

Melakukan pelestarian hutan sama dengan menyelamatkan ekosistem dari hutan itu sendiri, ekosistem terbentuk oleh komponen hidup dan tak hidup di suatu tempat yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur. Keteraturan itu terjadi oleh adanya arus materi dan energi yang terkendalikan oleh arus informasi antara komponen dalam ekosistem itu. Masing-masing komponen mempunyai fungsi atau relung, selama masing-masing komponen itu melakukan fungsinya dan bekerjasama dengan baik, keteraturan ekosistem itupun terjaga. Keteraturan ekosistem menunjukkan ekosistem tersebut ada dalam suatu keseimbangan tertentu. Keseimbangan itu tidak bersifat statis melainkan dinamis. Ia selalu berubah-ubah, kadang-kadang perubahan itu besar dan kadang-kadang kecil. Perubahan itu dapat terjadi secara alamiah maupun sebagai perbuatan manusia. (Soemarwoto, 1983).

Awang (2002) menyatakan bahwa kelestarian hutan rakyat ditentukan oleh beberapa faktor di antaranya adalah: kebutuhan ekonomi masyarakat, pandangan-pandangan, kebutuhan penyelamatan lingkungan, dan sebagainya. Lebih lanjut Awang (2002) menyebutkan bahwa pemanfaatan hutan rakyat yang seimbang antara kepentingan ekonomi dan lingkungan mengakibatkan hutan rakyat akan lestari. Penyebab tidak lestarinya hutan rakyat adalah eksploitasi yang berlebihan terhadap hasil hutan rakyat.

Pelestarian hutan dalam arti luas adalah pemanfaatan hutan secara lestari dan pengawetan

berbagai sumber alam yang berada di dalam maupun di sekitar hutan. pengertian pelestarian hutan secara khusus adalah bentuk dan proses pengelolaan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga secara terus-menerus dapat memberikan produksi dan jasa yang diharapkan, tetapi tidak mengurangi fungsi hutan dan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang tidak diinginkan.

Pelestarian hutan juga merupakan berbagai praktek dan perbuatan yang dilakukan pada setiap kegiatan kehutanan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sudah disepakati secara umum. Dalam kegiatan pelestarian hutan, seluruh jajaran baik pemerintah maupun masyarakat bersama-sama melestarikan hutan. Menurut Dephut (2006), pelestarian hutan adalah sebagai suatu upaya atau serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mempertahankan agar hutan dapat memberikan manfaat dan pengaruhnya yang positif secara berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Higman (2006) mendefinisikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan adalah sebagai suatu proses pengelolaan hutan untuk mencapai suatu tujuan atau secara lebih jelas yaitu produksi hasil hutan dan jasa secara berkelanjutan tanpa mengurangi nilai dan produktivitas di masa mendatang dan tanpa efek negatif baik fisik maupun sosial.

SIMPULAN

Upaya pengelolaan hutan konservasi TNGHS yang telah dilakukan baik oleh pemerintah, LSM, ataupun pihak terkait selama ini kurang berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini karena kurangnya melibatkan masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan tersebut. Dengan demikian perlu adanya pembinaan dan pengelolaan hutan dengan berbagai pendekatan baik secara budaya, pembangunan fisik maupun secara ekologis, dimana pembinaan dan pengelolaan merupakan faktor penting dalam usaha pelibatan masyarakat pada konservasi. Dengan demikian perlu adanya penyampaian pesan atau informasi secara efektif oleh petugas kehutanan dan aparat terkait kepada masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan dan pelestarian hutan konservasi TNGHS.

Meningkatkan kualitas penggunaan saluran komunikasi dalam penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat sekitar hutan yang dilihat dari segi ketersediaan saluran komunikasi, jenis saluran komunikasi, kemudahan dalam mengakses saluran dan ketepatan dalam penggunaan saluran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin A. 1994. Strategi komunikasi: *suatu pengantar ringkas*, Bandung: Armico.
- Barber C.V., Johnson N.C. 1999. "Menyelamatkan sisa hutan di Indonesia dan Amerika Serikat". Dalam Hafild, E (eds). Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Berlo D.K. 1960. *The Process of communication an introduction to theory and practice*. New York: Holt Rinehart and Winston.
- Cangara H. 2002. *Pengantar ilmu komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo. Persada.
- Djaenudin. 1994. *Kesesuaian lahan untuk tanaman pertanian dan tanaman kehutanan*. Laporan Teknis. Bogor: Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat.
- [Dephut] Departemen Kehutanan. 2006. *Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Tahun 2005-2009*. (Penyempurnaan). Jakarta: Dephut.
- Effendy OU. 2003. *Ilmu teori dan filsafat*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- 2007. *Ilmu komunikasi teori dan praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Fuad F.H, Maskanah S. 2000. *Inovasi penyelesaian sengketa pengelolaan sumberdaya hutan*. Bogor; Pustaka Latin.
- Ife J.W. 1995. *Community development: creating community alternatives- vision, analysis and practice*. Melbourne: Longman.
- Jahi A. 1988. *Komunikasi massa dan pembangunan pedesaan di negara-negara dunia ketiga: suatu pengantar*. Jakarta: Gramedia.
- Kincaid D.L, Schramm, W. 1977. *Asas-asas komunikasi antarmanusia*. Jakarta: LP3ES.
- Komaruddin. 1983. Psikologi Kepemimpinan. Ensiklopedia Manajemen. Bandung: Alumni.
- Lasswell H.D. 1972. The structure and function of communication in society dalam Wilbur Schramm, *Mass communication*. Urbana, Chicago: University of Illinois Press.
- Liliweri A. 2001. *Gatra-gatra komunikasi antar budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Manan S. 1997. *Hutan, rimbawan dan masyarakat*. Bogor. IPB Press.
- Pambudi, R. 1999. *Karakteristik Personal, Perilaku Komunikasi, Perilaku Wirausaha dan Penyuluhan dalam Sistem Agribisnis Peternakan Ayam*. Disertasi Program Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- [Pusbinlulut]. Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan. 2002. *Buku Saku Penyuluhan Kehutanan*. Jakarta. Pusbinlulut. Departemen Kehutanan.
- Rogers E.M. 2003. *Diffusion of innovations. fifth Edition*. Free Press. New York.
- Setyono D. 2003, *Upaya pengelolaan TNGH*. (Makalah Semiloka) Jakarta: Pusbinlulut. Departemen Kehutanan.
- Schramm W. Forter. 1973. *Men, message and media : A look At Human Communication*. New York: Harper and Row.
- Sinukaban N. 1994. *Membangun pertanian menjadi industri yang lestari dengan pertanian konservasi*. Bogor. IPB: Press.
- Soemarwoto, O. 1983. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan
- Sugandha, D. 1988. *Administrasi strategi, taktik dan efisiensi*. Jakarta: Ghalia.
- [TNGHS], Taman Nasional Gunung Halimun Salak. 2008. Kabandungan: Balai TNGHS.
- Widada. 2004.: Nilai Manfaat Ekonomi dan Pemanfaatan Taman Nasional Gunung Halimun. [Disertasi] Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Wijayanto, N. 2006. Strategi Pengelolaan Hutan rakyat Lestari. Review hasil Penelitian Hutan Rakyat. Bogor: BP2HT.